

Judul : RUU TPKS Diupayakan Selesai Satu Masa Sidang
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

RUU TPKS Diupayakan Selesai Satu Masa Sidang

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RUU TPKS.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — DPR RI pada Selasa (18/1) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

"Apakah RUU inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI?" tanya Puan diikuti pernyataan setuju anggota yang hadir di ruang rapat. Selasa (18/1).

Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya berharap pembahasan RUU TPKS bisa selesai dalam satu masa sidang. "Kami berusaha satu masa sidang kelar, masa sidang ini kan sampai 18 Februari kalau surpresnya cepat turun, itu bisa kita bahas," kata Willy.

Menurut Willy, idealnya RUU TPKS dibahas kembali di alat kelengkapan dewan (AKD) pengusul, yaitu

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ia mengatakan, berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan beberapa pimpinan sejauh ini, pimpinan menyepakati hal tersebut. Namun, kesepakatan itu sifatnya masih informal.

"Tapi, masih informal ya putusannya nanti ada di Bamus setelah surpres turun. Tentu, tadi hasil komunikasi internal dengan pimpinan setelah rapur ini kita akan langsung kirim hasilnya ke Presiden untuk segera diterbitkan surpres dan DIMnya," ucapnya.

Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco Ahmad mengatakan, setelah disahkan, DPR akan segera berkitir surat kepada presiden. DPR saat ini menunggu surat presiden untuk melanjutkan pembahasan RUU TPKS.

"Iya, kita langsung kirim surat ke presiden sambil menunggu surpres turun, kami akan melakukan FGD (*forum group discussion*) untuk kepentingan menampung aspirasi masyarakat dan kemudian setelahnya kita baru akan masuk ke pembahasan," kata Dasco.

Diketahui sampai saat ini DPR

belum menunjuk AKD mana yang akan membahas RUU TPKS. Dasco mengatakan, penunjukan AKD dilakukan dalam rapat Bamus setelah Presiden mengirimkan surpresnya ke DPR.

"Setelah hari ini disahkan sebagai inisiatif DPR, tentunya kita akan menunjuk AKD yang akan membahas. Dan, kita harapkan karena kebutuhan yang mendesak, pembahasan-pembahasan ini bisa dilakukan dengan efisien, namun terukur sehingga bisa diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama," ujarnya.

Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU TPKS disahkan jadi RUU inisiatif DPR RI. Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menilai RUU TPKS tidak komprehensif.

"Kami Fraksi PKS menolak RUU tentang TPKS untuk ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI, bukan karena kami tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesesilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting dalam pencegahan dan perlindungan dari kekerasan

seksual," katanya menegaskan.

Dalam pendapat fraksinya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, Riezky Aprilia, mengatakan, Fraksi PDIP menyatakan menolak tegas segala bentuk tindakan kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual. PDIP berharap RUU TPKS menjadi payung hukum yang akan memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

"Dengan hasil pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual, Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui RUU TPKS untuk disahkan di rapat paripurna hari ini," ujar Riezky.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan bahwa semangat RUU TPKS tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membuatnya jera dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Selain itu, RUU TPKS juga dinilai berpihak pada korban dan mengatur pemulihan, baik bagi korban secara psikologis maupun sosial.

"*Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui dan menyepakati agar RUU TPKS disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku," ungkapnya. ■ **ed: andri saubani**